

BERITA DAERAH KOTA SUKABUMI



TAHUN 2012 NOMOR 11

PERATURAN WALIKOTA SUKABUMI

TANGGAL : 8 JUNI 2012

NOMOR : 11 TAHUN 2012

TENTANG : **RENCANA PENCAPAIAN STANDAR
PELAYANAN MINIMAL KOTA SUKABUMI
TAHUN 2012 - 2015**

Sekretariat Daerah Kota Sukabumi

Bagian Hukum

2012

BERITA DAERAH KOTA SUKABUMI



SALINAN

NOMOR 11

2012

PERATURAN WALIKOTA SUKABUMI

NOMOR 11 TAHUN 2012

TENTANG :

RENCANA PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL
KOTA SUKABUMI TAHUN 2012-2015

WALIKOTA SUKABUMI,

- Menimbang : a. bahwa Standar Pelayanan Minimal merupakan ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal untuk menjamin akses masyarakat mendapatkan pelayanan dasar dari Pemerintah Kota Sukabumi yang disusun sesuai dengan ukuran-ukuran yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. bahwa untuk menerapkan Standar Pelayanan Minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perlu ditetapkan Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Kota Sukabumi Tahun 2012-2015 yang ditetapkan dengan Peraturan Walikota Sukabumi;

Mengingat.....

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5. Undang-Undang.....

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4594);
9. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Urusan Pemerintahan Kota Sukabumi (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2008 Nomor 2);
10. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Sukabumi (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2008 Nomor 6);

Memperhatikan

- Memperhatikan :
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 2. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 19 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Lingkungan Hidup Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota;
 3. Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 22/PERMEN/M/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Perumahan Rakyat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota;
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pemerintahan Dalam Negeri di Kabupaten/Kota;
 5. Peraturan Menteri Sosial Nomor 129/HUK/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota;
 6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 741/MENKES/PER/VII/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di Kabupaten/Kota;
 7. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 22/PER/M.KOMINFO/12/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Komunikasi dan Informatika di Kabupaten/Kota;
 8. Peraturan.....

8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 65/Permentan/OT.140/12/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketahanan Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota;
9. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 14/PRT/M/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota;
11. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor Per.15/MEN/X/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketenagakerjaan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : RENCANA PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL KOTA SUKABUMI TAHUN 2012-2015.

Pasal 1

- (1) Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Kota Sukabumi Tahun 2012-2015 merupakan ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal.
- (2) Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
 - a. Bidang Sosial;
 - b. Bidang Kesehatan;
 - c. Bidang Ketahanan Pangan;
 - d. Bidang.....

- d. Bidang Ketenagakerjaan;
- e. Bidang Pemerintahan Dalam Negeri;
- f. Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- g. Bidang Lingkungan Hidup;
- h. Bidang Pendidikan Dasar;
- i. Bidang Perumahan Rakyat;
- j. Bidang Komunikasi dan Informatika.

- (3) Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini

Pasal 2

Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Sukabumi yang membidangi pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2), dalam merencanakan jenis dan mutu pelayanan dasar wajib mengacu pada Peraturan Walikota ini.

Pasal 3

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan.....

Ditetapkan di Sukabumi
Pada tanggal 8 Juni 2012

WALIKOTA SUKABUMI,

ttd.

MOKH. MUSLIKH ABDUSSYUKUR

Diundangkan di Sukabumi
Pada tanggal 8 Juni 2012

SEKRETARIS DAERAH
KOTA SUKABUMI,

ttd.

M. N. HANAFIE ZAIN

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KOTA SUKABUMI,



EEN RUKMINI
NIP. 19720210199901 2 001

BERITA DAERAH KOTA SUKABUMI TAHUN 2012 NOMOR 11

LAMPIRAN : PERATURAN WALIKOTA SUKABUMI

NOMOR : 11 TAHUN 2012

TENTANG : RENCANA PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL KOTA SUKABUMI TAHUN 2012-2015

RENCANA PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL:

A. BIDANG SOSIAL

| NO | JENIS PELAYANAN DASAR | INDIKATOR | TARGET TAHUN PENCAPAIAN | | | |
|----|---|--|-------------------------|------|------|------|
| | | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| 1 | Pelaksanaan program/kegiatan Bidang Sosial: | | | | | |
| | a. Pemberian bantuan sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial skala Kota Sukabumi; | Persentase (%) PMKS skala Kota Sukabumi yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar. | 20% | 40% | 60% | 80% |
| | b. Penyelenggaraan pelayanan dan rehabilitasi sosial dalam Panti Sosial skala Kota Sukabumi. | Persentase (%) Panti Sosial skala Kota Sukabumi yang melaksanakan standar operasional pelayanan kesejahteraan sosial. | 20% | 40% | 60% | 80% |
| 2 | Penyediaan Sarana dan Prasarana sosial: | | | | | |
| | a. Penyediaan sarana prasarana panti sosial skala Kota Sukabumi; | Persentase (%) Panti Sosial skala Kota Sukabumi yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial. | 20% | 40% | 60% | 80% |
| | b. Penyediaan sarana prasarana pelayanan luar panti skala Kota Sukabumi. | Persentase (%) Organisasi Sosial/Yayasan/LSM yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial luar Panti Asuhan. | 15% | 30% | 45% | 60% |

| NO | JENIS PELAYANAN DASAR | INDIKATOR | TARGET TAHUN PENCAPAIAN | | | |
|----|--|---|-------------------------|------|------|------|
| | | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| 3 | a. Bantuan sosial bagi korban bencana skala Kota Sukabumi; | Persentase (%) Kota Sukabumi yang mengalami bencana memberikan bantuan sosial bagi korban bencana skala Kota Sukabumi; | 20% | 40% | 60% | 80% |
| | b. Evakuasi korban bencana skala Kota Sukabumi. | Persentase (%) Kota Sukabumi yang menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap untuk evakuasi korban bencana skala Kota Sukabumi. | 20% | 40% | 60% | 80% |
| 4 | Pelaksanaan dan pengembangan jaminan sosial bagi penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial: - Penyelenggaraan jaminan sosial skala Kota Sukabumi | Persentase (%) Kota Sukabumi yang menyelenggarakan jaminan sosial bagi penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial | 10% | 20% | 30% | 40% |

B. BIDANG KESEHATAN

| NO | JENIS PELAYANAN DASAR | INDIKATOR | TARGET TAHUN PENCAPAIAN | | | |
|----|---------------------------|---|-------------------------|-------|------|-------|
| | | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| 1 | PELAYANAN KESEHATAN DASAR | Cakupan kunjungan Ibu Hamil K4 | 86% | 88% | 90% | 95% |
| | | Cakupan komplikasi Kebidanan yang ditangani | 77% | 78% | 79% | 80% |
| | | Cakupan pertolongan persalinan oleh Tenaga Kesehatan yang memiliki Kompetensi Kebidanan | 86% | 88% | 90% | 90% |
| | | Cakupan pelayanan Nifas | 87% | 88% | 90% | 90% |
| | | Cakupan Neonatus dengan komplikasi yang ditangani | 82% | 83% | 84% | 85% |
| | | Cakupan Kunjungan Bayi | 84% | 86% | 88% | 90% |
| | | Cakupan Kelurahan <i>Universal Child Immunization</i> (UCI) | 85% | 90% | 95% | 100% |
| | | Cakupan pelayanan anak balita | 84% | 86% | 88% | 90% |
| | | Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada Anak Usia 6 - 24 bulan keluarga miskin | 100% | 100% | 100% | 100% |
| | | Cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan | 100% | 100% | 100% | 100% |
| | | Cakupan penjangkaran kesehatan siswa SD dan setingkat | 97% | 98% | 99% | 100% |
| | | Cakupan peserta KB Aktif | 71% | 71,5% | 72% | 72,5% |

| NO | JENIS PELAYANAN DASAR | INDIKATOR | TARGET TAHUN PENCAPAIAN | | | |
|----|---|--|-------------------------|------|------|------|
| | | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| | | Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit | 100% | 100% | 100% | 100% |
| | | Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin | 80% | 85% | 90% | 100% |
| 2 | PELAYANAN KESEHATAN RUJUKAN | Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin | 70% | 80% | 90% | 100% |
| | | Cakupan pelayanan Gawat Darurat Level 1 yang harus diberikan Sarana Kesehatan (RS) | 70% | 80% | 90% | 100% |
| 3 | PENYELIDIKAN EPIDEMIOLOGI DAN PENANGGULANGAN KL | Cakupan Kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan Epidemiologi < 24 jam | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 4 | PROMOSI KESEHATAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT | Cakupan Desa Siaga Aktif | 74% | 76% | 78% | 80% |

C. BIDANG

C. BIDANG KETAHANAN PANGAN

| NO. | JENIS PELAYANAN DASAR | INDIKATOR | TARGET TAHUN PENCAPAIAN | | | |
|-----|----------------------------------|--|-------------------------|------|------|------|
| | | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| 1 | Ketersediaan dan Cadangan Pangan | a. Ketersediaan energi dan protein per kapita per hari | | | | |
| | | - Ketersediaan energi per kapita per hari | 88% | 89% | 90% | 90% |
| | | - Ketersediaan protein per kapita per hari | 90% | 90% | 90% | 90% |
| | | b. Penguatan cadangan pangan | | | | |
| | | - Cadangan pangan tingkat Pemerintah Kota Sukabumi | 60% | 60% | 60% | 60% |
| | | - Cadangan pangan tingkat masyarakat | 45% | 50% | 55% | 60% |
| | | - Jumlah Kecamatan yang mempunyai cadangan pangan masyarakat | 45% | 50% | 55% | 60% |

| NO | JENIS PELAYANAN DASAR | INDIKATOR | TARGET TAHUN PENCAPAIAN | | | |
|----|--------------------------------------|--|-------------------------|------|------|------|
| | | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| 2 | Distribusi dan Akses Pangan | a. Ketersediaan informasi pasokan, harga, dan akses pangan di Daerah | 90% | 90% | 90% | 90% |
| | | b. Stabilitas harga dan pasokan pangan | | | | |
| | | - Stabilitas harga | 80% | 85% | 90% | 90% |
| | | - Stabilitas pasokan | 80% | 85% | 90% | 90% |
| 3 | Penganekaragaman dan Keamanan Pangan | a. Skor Pola Pangan Harapan (PPH) | 80% | 85% | 90% | 90% |
| | | b. Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan | 77% | 78% | 79% | 80% |
| 4 | Penanganan Kerawanan Pangan | Penanganan daerah rawan pangan | 100% | 100% | 100% | 100% |

D. BIDANG KETENAGAKERJAAN

| NO | JENIS PELAYANAN DASAR | INDIKATOR | TARGET TAHUN PENCAPAIAN | | | |
|----|---|--|-------------------------|------|------|------|
| | | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| 1 | Pelayanan pelatihan kerja | 1. Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi | 15% | 30% | 45% | 60% |
| | | 2. Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis masyarakat | 10% | 25% | 40% | 55% |
| | | 3. Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan | 10% | 25% | 40% | 55% |
| 2 | Pelayanan penempatan tenaga kerja | Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan | 15% | 30% | 45% | 60% |
| 3 | Pelayanan penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial | Besaran kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama | 10% | 20% | 30% | 40% |
| 4 | Pelayanan kepesertaan Jamsostek | Besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta program Jamsostek | 10% | 20% | 30% | 40% |
| 5 | Pelayanan pengawasan Ketenagakerjaan | 1. Besaran pemeriksaan perusahaan | 10% | 20% | 30% | 40% |
| | | 2. Besaran pengujian peralatan di perusahaan | 10% | 20% | 30% | 40% |

E. BIDANG

E. BIDANG PEMERINTAHAN DALAM NEGERI

| NO | JENIS PELAYANAN DASAR | INDIKATOR | TARGET TAHUN PENCAPAIAN | | | |
|----|--|---|-------------------------|------|------|------|
| | | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| 1 | Penanggulangan bencana kebakaran | 1. Cakupan pelayanan bencana kebakaran Kota | 10% | 15% | 20% | 25% |
| | | 2. Tingkat waktu tanggap (<i>respon time rate</i>) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) | 30% | 45% | 60% | 75% |
| 2 | Pelayanan dokumen Kependudukan | 1. Cakupan Penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP) | 100% | 100% | 100% | 100% |
| | | 2. Cakupan Penerbitan Akta Kelahiran | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 3 | Pemeliharaan ketentraman dan ketertiban masyarakat | 1. Cakupan petugas Linmas | 20% | 30% | 40% | 50% |
| | | 2. Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, dan Keindahan) | 40% | 50% | 60% | 70% |

F. BIDANG

F. BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

- SUBBIDANG PEKERJAAN UMUM

| NO | JENIS PELAYANAN DASAR | INDIKATOR | TARGET TAHUN PENCAPAIAN | | | |
|----|--|--|-------------------------|-------|-------|------|
| | | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| 1 | Sumber Daya Air (Prioritas utama penyediaan Air untuk Kebutuhan Masyarakat) | 1. Tersedianya air baku untuk memenuhi kebutuhan pokok minimal sehari hari | 81,8% | 84,8% | 87,8% | - |
| | | 2. Tersedianya air irigasi untuk pertanian rakyat pada sistem irigasi yang sudah ada | 90,5% | 91,0% | 91,5% | - |
| 2 | Jalan | | | | | |
| | - Jaringan | | | | | |
| | • Aksesibilitas | - Tersedianya jalan yang menghubungkan pusat-pusat kegiatan dalam Daerah | 100% | 100% | 100% | - |
| | • Mobilitas | - Tersedianya jalan yang memudahkan masyarakat perindividu melakukan perjalanan | 236% | 232% | 229% | - |
| | • Keselamatan | - Tersedianya jalan yang menjamin pengguna jalan berkendara dengan selamat | 68% | 69,5% | 71% | - |
| | - Ruas | | | | | |
| | • Kondisi jalan | - Tersedianya jalan yang menjamin kendaraan dapat berjalan dengan selamat dan nyaman | 68% | 69,5% | 71% | - |

| NO | JENIS PELAYANAN DASAR | INDIKATOR | TARGET TAHUN PENCAPAIAN | | | |
|----|--|---|-------------------------|-------|------|------|
| | | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| | • Kecepatan | - Tersedianya jalan yang menjamin perjalanan dapat dilakukan sesuai dengan kecepatan rencana | 30% | 45% | 60% | - |
| 3 | Air Minum <u>Cluster Pelayanan:</u> - Sangat Buruk - Buruk - Sedang - Baik - Sangat Baik | - Tersedianya akses air minum yang aman melalui Sistem Penyediaan Air Minum dengan jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi dengan kebutuhan pokok minimal 60 liter/orang/hari | 20% | 30% | 40% | - |
| | | | 250% | 37,5% | 50% | - |
| | | | 35% | 52,5% | 70% | - |
| | | | 40% | 60% | 80% | - |
| | | | 50% | 75% | 100% | - |
| 4 | Penyehatan Lingkungan Permukiman (Sanitasi Lingkungan dan Persampahan) | | | | | |
| | - Air Limbah Permukiman | - Tersedianya sistem air limbah setempat yang memadai | 3,75% | 15% | 60% | - |
| | | - Tersedianya sistem air limbah skala komunitas/kawasan/kota | 0,31% | 1,25% | 5% | - |
| | - Pengelolaan Sampah | - Tersedianya fasilitas pengurangan sampah di perkotaan. | 10% | 15% | 20% | - |
| | | - Tersedianya sistem penanganan sampah di perkotaan. | 35% | 52,5% | 70% | - |

| NO | JENIS PELAYANAN DASAR | INDIKATOR | TARGET TAHUN PENCAPAIAN | | | |
|----|--|--|-------------------------|--------|------|------|
| | | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| | - Drainase | Tersedianya sistem jaringan drainase skala kawasan dan skala kota sehingga tidak terjadi genangan (lebih dari 30 cm, selama 2 jam) dan tidak lebih dari 2 kali setahun | 3,13% | 12,5% | 50% | - |
| 5 | Penanganan Permukiman Kumuh Perkotaan | Berkurangnya luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan | 19.91% | 14.95% | 10% | - |
| 6 | Penataan Bangunan dan Lingkungan | | | | | |
| | - Izin Mendirikan Bangunan (IMB) | Terlayannya masyarakat dalam pengurusan IMB | 100% | 100% | 100% | - |
| | - Harga Standar Bangunan Gedung Negara (HSBGN) | Tersedianya pedoman Harga Standar Bangunan Gedung Negara | 50% | 70% | 100% | - |
| 7 | Jasa Konstruksi | | | | | |
| | - Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) | Penerbitan IUJK dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja setelah persyaratan lengkap. | 100% | 100% | 100% | - |
| | - Sistem Informasi Jasa Konstruksi | Tersedianya Sistem Informasi Jasa Konstruksi setiap tahun | 50% | 75% | 100% | - |

- SUBBIDANG PENATAAN RUANG

| NO | JENIS PELAYANAN DASAR | INDIKATOR | TARGET TAHUN PENCAPAIAN | | | |
|----|--|---|-------------------------|-------|------|------|
| | | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| 1 | Penataan Ruang | | | | | |
| | - Informasi penataan ruang | Tersedianya informasi mengenai Rencana Tata Ruang (RTR) wilayah kota beserta rencana rincinya melalui peta analog dan peta digital | 25% | 50% | 100% | - |
| | - Pelibatan peran masyarakat dalam proses penyusunan RTR | Terlaksananya penjangkaran aspirasi masyarakat melalui forum konsultasi publik yang memenuhi syarat inklusif dalam proses penyusunan RTR dan program pemanfaatan ruang, yang dilakukan minimal 2 (dua) kali setiap disusunnya RTR dan program pemanfaatan ruang | 50% | 75% | 100% | - |
| | - Izin Pemanfaatan Ruang | Terlayaninya masyarakat dalam pengurusan izin pemanfaatan ruang sesuai dengan Peraturan Daerah tentang RTR wilayah kota beserta rencana rincinya | 25% | 50% | 100% | - |
| | - Pelayanan pengaduan pelanggaran tata ruang | Terlaksanakannya tindakan awal terhadap pengaduan masyarakat tentang pelanggaran di bidang penataan ruang, dalam waktu 5 (lima) hari kerja | 25% | 50% | 100% | - |
| | - Penyediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Publik | Tersedianya luasan RTH publik sebesar 20% dari luas wilayah kota | 4,69% | 15,6% | 25% | - |

G. BIDANG LINGKUNGAN HIDUP

| NO | JENIS PELAYANAN DASAR | INDIKATOR | TARGET TAHUN PENCAPAIAN | | | |
|----|--|---|-------------------------|------|------|------|
| | | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| 1 | Pelayanan pencegahan pencemaran air | Prosentase jumlah usaha dan/atau kegiatan yang mentaati persyaratan administrasi dan teknis pencegahan pencemaran air | 40% | 60% | 80% | 100% |
| 2 | Pelayanan pencegahan pencemaran udara dan sumber tidak bergerak | Prosentase jumlah usaha dan/atau kegiatan sumber tidak bergerak yang memenuhi persyaratan administrasi dan teknis pengendalian pencemaran udara | 40% | 60% | 80% | 100% |
| 3 | Pelayanan informasi status kerusakan lahan dan/atau tanah untuk produksi Biomassa | Prosentase luasan lahan yang telah ditetapkan status kerusakan lahan dan/atau tanah untuk produksi Biomassa yang diinformasikan | 40% | 60% | 80% | 100% |
| 4 | Pelayanan tindak lanjut pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup | Prosentase jumlah pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang ditindak lanjuti | 0% | 0% | 0% | 90% |

H. BIDANG ...

H. BIDANG PENDIDIKAN DASAR

| NO | JENIS PELAYANAN DASAR | INDIKATOR | TARGET TAHUN PENCAPAIAN | | | |
|----|-----------------------|--|-------------------------|------|------|------|
| | | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | SARANA/PRASARANA | Tersedianya satuan pendidikan dalam jarak terjangkau dengan berjalan kaki yaitu maksimal 3 KM untuk SD/MI dan 6 KM untuk SMP/MTs dari Kelompok Pemukiman Permanen di daerah terpencil: | | | | |
| | | Jumlah kelompok pemukiman permanen yang sudah di layani SD/MI dalam jarak kurang dari 3 km | 100% | 100% | 100% | 100% |
| | | Jumlah kelompok pemukiman permanen | | | | |
| | | Jumlah kelompok pemukiman permanen yang sudah di layani SMP/MTs dalam jarak kurang dari 6 KM | 100% | 100% | 100% | 100% |
| | | Jumlah kelompok pemukiman permanen | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|----------------------------------|---|------|------|------|------|
| 2 | PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN | Jumlah peserta didik dalam setiap rombongan belajar untuk SD/MI tidak melebihi 32 orang dan untuk SMP/MTs tidak melebihi 36 orang untuk setiap rombongan belajar tersedia 1 (satu) ruang kelas yang dilengkapi dengan meja dan kursi yang cukup untuk peserta didik dan guru serta papan tulis: | | | | |
| | | Jumlah SD/MI yang semua rombel-nya tidak melebihi 32 siswa | 60% | 75% | 85% | 100% |
| | | Jumlah SD/MI di Kota Sukabumi | | | | |
| | | Jumlah SD/MI yang telah memenuhi kebutuhan ruang kelas dan meja dan kursi serta papan tulis untuk setiap rombel | 100% | 100% | 100% | 100% |
| | | Jumlah SD/MI di Kota Sukabumi | | | | |
| | | Jumlah SMP/MTs yang semua rombelnya tidak melebihi 36 siswa | 90% | 95% | 97% | 100% |
| | | Jumlah SMP/MTs di Kota Sukabumi | | | | |
| | | Jumlah SMP/MTs yang telah memenuhi kebutuhan ruang kelas dan meja dan kursi serta papan tulis untuk setiap rombel | 100% | 100% | 100% | 100% |
| | | Jumlah SMP/MTs di Kota Sukabumi | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---------------------------------|------------------|--|------|------|------|------|
| 3 | SARANA/PRASARANA | Di setiap SMP dan MTS tersedia ruang laboratorium IPA yang dilengkapi dengan meja dan kursi yang cukup untuk 36 peserta didik dan minimal satu set peralatan praktek IPA untuk demonstrasi dan eksperimen peserta didik: | | | | |
| | | Jumlah SMP/MTs yang memiliki set peralatan praktek IPA untuk demontarsi dan eksperimen peserta didik | 90% | 95% | 97% | 100% |
| | | Jumlah SMP/MTs di Kota Sukabumi | | | | |
| | | Jumlah kelompok permukiman permanen di Kota Sukabumi | 100% | 100% | 100% | 100% |
| | | Jumlah SMP/MTs di Kota Sukabumi | | | | |
| | | Di setiap SD/MI dan SMP/MTs tersedia satu ruang guru yang dilengkapi dengan meja dan kursi untuk setiap orang guru, kepala sekolah, dan staf kependidikan lainnya dan di setiap SMP/MTs tersedia ruang kepala sekolah yang terpisah dari ruang tunggu: | | | | |
| | | Jumlah SD/MI yang memiliki ruang guru dan meja+kursi untuk setiap orang | 100% | 100% | 100% | 100% |
| | | Jumlah SD/MI di Kota Sukabumi | | | | |
| | | Jumlah SMP/MTS yang memiliki ruang guru dan meja serta kursi untuk setiap orang; | 100% | 100% | 100% | 100% |
| | | Jumlah SMP/MTs di Kota Sukabumi | | | | |
| | | Jumlah SMP/MTs yang memiliki ruang kepala sekolah/ madrasah, terpisah dari ruang guru dan di lengkapi meja dan kursi; | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Jumlah SMP/MTs di Kota Sukabumi | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|----------------------------------|--|------|------|------|------|
| 4 | PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN | Di setiap SD/MI tersedia 1 (satu) orang guru untuk setiap 32 peserta didik dan 6 (enam) orang guru untuk setiap satuan pendidikan dan untuk daerah khusus 4 (empat) orang guru setiap satuan pendidikan: | | | | |
| | | Jumlah SD/MI yang memiliki satu orang guru untuk setiap 32 peserta didik | 97% | 100% | 100% | 100% |
| | | Jumlah SD/MI di Kota Sukabumi | | | | |
| | | Di setiap SMP/MTs tersedia 1 (satu) orang guru untuk setiap mata pelajaran dan untuk daerah khusus tersedia satu orang guru untuk setiap rumpun mata pelajaran: | | | | |
| | | Jumlah SMP/MTs yang memiliki guru untuk setiap mata pelajaran atau untuk daerah khusus 1 (satu) guru untuk setiap rumpun mata pelajaran | 100% | 100% | 100% | 100% |
| | | Jumlah SMP/MTs di Kota Sukabumi | | | | |
| | | Di setiap SD/MI tersedia 2 (dua) orang guru yang memenuhi kualifikasi akademik SI atau D-IV dan 2 (dua) orang guru yang telah memiliki sertifikat pendidik: | | | | |
| | | Jumlah SD/MI yang memiliki 2 orang guru dengan kualifikasi S1/D-IV | 100% | 100% | 100% | 100% |
| | | Jumlah SD/MI di Kota Sukabumi | | | | |
| | | Jumlah SD/MI yang memiliki 2 orang guru yang telah memiliki sertifikat pendidik | 100% | 100% | 100% | 100% |
| | | Jumlah SD/MI di Kota Sukabumi | | | | |

Di setiap

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|--|------|------|------|------|
| | | Di setiap SMP/MTs tersedia guru dengan kualifikasi akademik SI atau D-IV sebanyak 70% dan separuh di antaranya (35% dari keseluruhan guru) telah memiliki sertifikat pendidik, masing-masing satu orang untuk daerah khusus masing-masing sebanyak 40% dan 20%: | | | | |
| | | Jumlah SMP/MTs yang memiliki guru berkualifikasi S1/D-IV > 70% (untuk daerah khusus > 40%) | 100% | 100% | 100% | 100% |
| | | Jumlah SMP/MTs di Kota Sukabumi | | | | |
| | | Jumlah SMP/MTs yang memiliki guru dengan kualifikasi S1/D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik > 35% (untuk daerah khusus > 20%) | 100% | 100% | 100% | 100% |
| | | Jumlah SMP/MTs di Kota Sukabumi | | | | |
| | | Di setiap SMP/MTs tersedia guru dengan kualifikasi akademik SI atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik masing-masing satu orang mata pelajaran Matematika, IPA, Bhs. Indonesia dan Bhs. Inggris: | | | | |
| | | Jumlah SMP/MTs yang memiliki guru berkualifikasi S1/D-IV dan telah bersertifikat pendidik masing-masing 1 orang untuk mata pelajaran matematika, IPA, Bhs. Indonesia, dan Bhs. Inggris | 100% | 100% | 100% | 100% |
| | | Jumlah SMP/MTs di Kota Sukabumi | | | | |
| | | Di setiap Kota semua Kepala SD/MI berkualifikasi akademik S-1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik: | | | | |
| | | Jumlah Kepala SD/MI yang berkualifikasi akademik S1/D-IV dan telah bersertifikat pendidik | 100% | 100% | 100% | 100% |
| | | Jumlah SD/MI di Kota Sukabumi | | | | |

Di setiap

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|-----------|---|------|------|------|------|
| | | Di setiap Kota semua Kepala SMP/MTs berkulifikasi akademik S-1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik: | | | | |
| | | Jumlah Kepala SMP/MTs yang berkualifikasi akademik S1/D-IV dan telah bersertifikat pendidik | 100% | 100% | 100% | 100% |
| | | Jumlah SMP/MTs di Kota Sukabumi | | | | |
| | | Di Kota Sukabumi semua pengawas sekolah dan madrasah memiliki kualifikasi akademik S-1 atau D-IV dan telah memiliki setifikat pendidik: | | | | |
| | | Jumlah pengawas/madrasah sekolah yang berkualifikasi akademik S1/D-IV dan telah bersertifikat pendidik | 100% | 100% | 100% | 100% |
| | | Jumlah pengawas di Kota Sukabumi | | | | |
| 5 | KURIKULUM | Pemerintah Kota Sukabumi memiliki rencana dan melaksanakan kegiatan untuk membantu satuan pendidikan dalam mengembangkan kurikulum dan proses pembelajaran yang efektif | 100% | 100% | 100% | 100% |
| | | Pemerintah Kota Sukabumi memiliki rencana dan melaksanakan kegiatan untuk membantu sekolah/madrasah dalam mengembangkan kurikulum dan proses pembelajaran yang efektif | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|--------------------------|---|------|------|------|------|
| 6 | PENJAMIN MUTU PENDIDIKAN | Kunjungan pengawas ke satuan pendidikan di lakukan satu kali setiap bulan dan setiap kunjungan di lakukan selama 3 jam untuk melakukan supervisi dan pembinaan. | 100% | 100% | 100% | 100% |
| | | Jumlah SD/MI yang mendapat kunjungan oleh pengawas satu kali setiap bulan dan setiap kunjungan selama > 3 jam untuk supervisi dan pembinaan | 100% | 100% | 100% | 100% |
| | | Jumlah SD/MI di Kota Sukabumi | | | | |
| | | Jumlah SMP/MTs yang mendapat kunjungan oleh pengawas satu kali setiap bulan dan setiap kunjungan selama > 3 jam untuk supervisi dan pembinaan | 100% | 100% | 100% | 100% |
| | | Jumlah SMP/MTs di Kota Sukabumi | 100% | 100% | 100% | 100% |

I. BIDANG PERUMAHAN RAKYAT

| NO | JENIS PELAYANAN DASAR | INDIKATOR | TARGET TAHUN PENCAPAIAN | | | |
|----|--|---|-------------------------|--------|--------|------|
| | | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| 1 | Perumahan Rakyat • Rumah layak huni dan terjangkau | - Cakupan ketersediaan rumah layak huni | 13,20% | 19,80% | 26,40% | 33 % |
| | | - Cakupan layanan rumah layak huni yang terjangkau | 9,20% | 13,80% | 18,40% | 23 % |
| 2 | • Lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan prasarana, sarana, dan utilitas umum (PSU) | Cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan PSU | 13,20% | 19,80% | 26,40% | 33 % |

J. BIDANG

J. BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

| NO | JENIS PELAYANAN DASAR | INDIKATOR | TARGET TAHUNAN PENCAPAIAN | | | |
|----|---|--|---------------------------|-------------------|-------------------|------|
| | | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| 1 | Pelaksanaan Diseminasi Informasi Nasional | 1. Pelaksanaan Diseminasi dan Pendistribusian Informasi Nasional melalui : | | | | |
| | | a) Media Massa : Majalah, Radio, dan Televisi | 12 Kali per Tahun | 12 Kali per Tahun | 12 Kali per Tahun | - |
| | | b) Media Baru seperti Website (Media Online) | Setiap Hari | Setiap Hari | Setiap Hari | - |
| | | c) Media Luar Ruang | 3 Kali per Tahun | 3 Kali per Tahun | 12 Kali per Tahun | - |
| 2 | Pengembangan dan Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) | 2. Cakupan pengembangan dan Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) di tingkat masyarakat | - | - | 50% | - |

Sukabumi, 8 Juni 2012

WALIKOTA SUKABUMI,

cap. ttd.

MOKH. MUSLIKH ABDUSSYUKUR

